



RANGKUL MASYARAKAT - Pj Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, mendeklarasikan komitmen antikorupsi pada peringatan Hakordia 2022 di kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jumat (9/12).

Pemkot Deklarasikan Komitmen Pemberantasan Korupsi

YOGYA, TRIBUN - Jajaran Pemkot Yogyakarta dan elemen warga masyarakat mendeklarasikan komitmen memberantas perilaku korupsi pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) 2022 di kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jumat (9/12).

Eksekutif berharap, publik bisa terlibat aktif menjalankan peran pengawasan dan tak ragu melapor-takan tindakan koruptif. Tentunya, penduduk Kota Pelajar menantikan bukti nyata dari komitmen tersebut.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi mengaku, dirinya bersama seluruh jajaran di lingkungan Pemkot, secara sungguh-sungguh berkomitmen pemberantasan korupsi. Lewat momentum Hakordia 2022 ini, ia pun mengajak ASN dan elemen masyarakat saling berkolaborasi dan bersinergi dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai kota yang berintegritas.

"Laporkan jika ada indikasi tindakan korupsi. Tentu, diperlukan mitigasi potensi kemungkinan munculnya praktik korupsi. Baik di da-

lam tubuh penyelenggara negara, pemerintah, maupun setiap kegiatan pembangunan di Kota Yogyakarta, tegasnya.

"Keterlibatan publik dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi akan dipertuas. Dengan begitu, ke depan, tumbuh kesadaran untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi," sambung Sumadi.

Sementara momentum Hakordia juga diperingati Kejaksan Tinggi (Kejati) DIY, Jumat (9/12) kemarin. Disebutkan, Kejati telah melakukan sembilan penuntutan perkara korupsi, baik ditingkat pertama, banding, serta kasasi.

Selain itu, Kejati DIY juga telah menangani dua penuntutan perkara perpajakan. Informasi itu disampaikan Kepala Kejati DIY, Katarina Endang Sarwestri, saat jumpa pers Hakordia 2022 di kantor Kejati DIY, kemarin.

Ia menjelaskan, beberapa penuntutan Kejati DIY di antaranya, perkara Tipikor dalam kegiatan Pengembangan Perlengkapan Komunikasi Kebencanaan Terpadu Tahap I

BPBD DIY Tahun 2018 dengan nilai kerugian Rp185.500.000

Lalu, Tipikor dan TPPU dalam Pemberian Kredit Pegawai dari Bank Jogja kepada karyawan PT Transvision Yogyakarta Tahun 2019 dan 2020 nilai kerugiannya Rp27.443.684.043. Selanjutnya, Tipikor Pengelolaan Jasa Pelayanan Medis di RSUD Wonosari Kab. Gunungkidul Tahun 2015 dengan kerugian Rp470.000.000.

Kemudian, tindak Pidana Perpajakan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan nilai kerugian Rp50.526.419.576. "Kemudian di bidang perdata, kami juga melakukan pemulihan keuangan negara total Rp71 miliar," terang Katarina.

Selain berhasil melakukan upaya penuntutan perkara korupsi, sepanjang 2022 ini, Kejati telah melakukan pendampingan terhadap 8 proyek strategis. Jika dikalkulasi, total nilai pendampingan mencapai Rp238 miliar. **(aka/hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005